

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim

Herdiyansa *¹
Chairani Adelina ²
Linggariama ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Prabumulih

*e-mail: herdiyansa99@gmail.com¹, Chairaniadelina@unpra.ac.id², anggariyama@gmail.com³

Abstrak

Herdiyansa (2025), "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim" penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Masing-masing Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang di kuantitatifkan dengan sampel 20 perangkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini probability sampling dengan menggunakan pendekatan cluster random sampling . Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang dibuat dengan SPSS versi 16. Hasil pengujian statistik diperoleh bahwa variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2) berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa (Y).

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa

Abstract

Herdiyansa (2025), "The Influence of Accountability and Transparency on Village Fund Management in Belida Darat District, Muara Enim Regency," aims to determine the influence of accountability and transparency on village fund management in each village in Belida Darat District, Muara Enim Regency. This study uses qualitative research with quantitative analysis, with a sample of 20 village officials. The method used in this study was probability sampling using a cluster random sampling approach. The analysis technique used was multiple linear regression using SPSS version 16. The results of statistical tests showed that the variables accountability (X1) and transparency (X2) had a negative effect on village fund management (Y).

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Management

PENDAHULUAN

kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial dan politik Negara. Dalam pemerintahan bangsa Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai tanggungjawab terhadap pemerataan kesejahteraan dan pembangunan daerah-daerah. Adapun pemerintah daerah terbagi menjadi dua tingkat, yaitu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Pemerintah merupakan sebuah sistem yang mempunyai wewenang dan /kota. Adanya kondisi beberapa daerah di Indonesia yang belum sesuai dengan harapan dari pemerintah pusat, maka pemerintah mengalokasikan dana daerah ke dalam APBN. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengatur otonomi daerah sebagaimana tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun (2014) tentang otonomi daerah.

Salah satu program dari pemerintahan desa adalah pembangunan desa, pembangunan desa ini sangat penting dalam mewujudkan pembangunan Nasional karena adanya pemerataan pembangunan secara langsung berimbang kepada upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pembangunan ini berupa pembangunan fisik, sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban dalam mengatur kepentingan masyarakat desa. Dalam Pengelolaan dana desa seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan perwakilan masyarakat desa. .

Dalam pengelolaan keuangan tersebut perlu transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan agar keuangan desa dikelola dalam keterbukaan, dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan juga untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksana kewajiban kepala desa dalam rangka

pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa sehingga pengelolaan dana desa menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat. Kepercayaan inilah yang akan mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa mandiri (Arfiansyah, 2020:1-6).

Transparansi digunakan untuk kepentingan publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, maka secara tidak langsung masyarakat bisa terlibat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap akuntabilitas dan transparansi yang bertujuan sebagai dorongan kepada instansi pemerintah seperti pemerintahan desa untuk selalu memperbaiki tata kelola pemerintah (*good governance*).

Belida Darat yang berdiri tahun 2012 adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Indonesia. Dengan wilayah seluas 264,26 km². Pada tahun 2025, terdapat 14.193 jiwa yang menempati kecamatan ini. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Lembak - Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir - Sebelah Timur: Kecamatan Kelekar - Sebelah Barat : Kota Prabumulih.

Wilayah ini membujur dari arah utara ke selatan dan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian sekitar 34-62 meter dari permukaan laut, dengan bentuk permukaan pada umumnya datar. Sebagai daerah lembah, wilayah kecamatan Belida Darat termasuk dalam daerah aliran anak sungai Rambang meski tidak cukup besar, di daerah ini juga terdapat banyak sungai-sungai kecil.

Pusat pemerintahan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim terletak di Desa Tanjung Bunut berbatas dgn 4 (empat) Dusun dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sialingan- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Gaung Asam- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Babat

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Ibul.

Pemerintah desa hendaklah lebih berfokus untuk menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat. Namun, untuk terciptanya kondisi tersebut hendaknya ada komunikasi yang berkesinambungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam hal ini perlu adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa sangat diperlukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa itu sendiri. Selain itu, akuntabilitas dari realisasi Dana Desa yang transparan dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di dukung oleh pendapat dan saran dari masyarakat.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang di kuantitatifkan dimana dalam penelitian ini menggunakan data Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2023 dan 2024. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang di kuantitatifkan karena data dalam penelitian ini diperoleh dari data Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Belida Darat yang terdiri dari 10 Desa, dengan sampel yang diambil adalah peneliti adalah 2 orang perangkat desa yang ada di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Belida Darat. Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling* dengan menggunakan pendekatan *cluster random sampling* karena peneliti mengambil seluruh populasi dijadikan sampel yaitu seluruh perangkat desa yang ada di Kecamatan Belida Darat yang terdiri dari 10 Desa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, kuesioner, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara analisis regresi linear berganda. Penelitian ini dilaksanakan di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

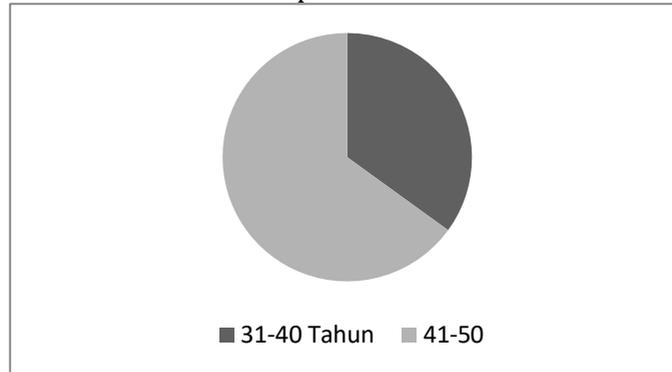
HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini dilakukan di 10 Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Belida Darat yang berdiri tahun 2012 adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Muara

Enim, Sumatra Selatan, Indonesia. Dengan wilayah seluas 264,26 km². Pada tahun 2025, terdapat 14.193 jiwa yang menempati kecamatan ini.

Responden dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Belida Darat. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Terdapat empat karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu usia, jenis kelamin dan jabatan. Untuk mendapat gambaran tentang responden, berikut adalah karakteristik responden dari penelitian ini yang meliputi usia, jenis kelamin, lama bekerja, dan pendidikan terakhir.

a. Karakteristik Responden berdasarkan Usia



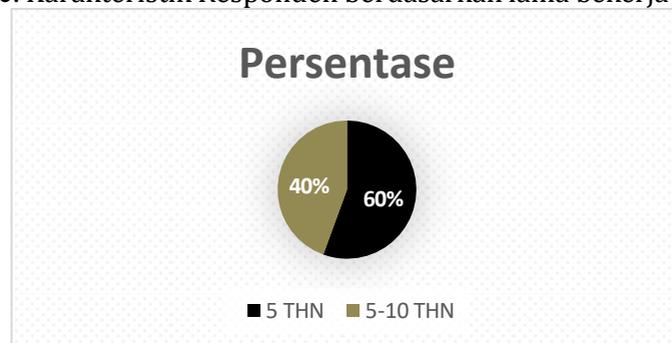
Gambar 4.1

b. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin



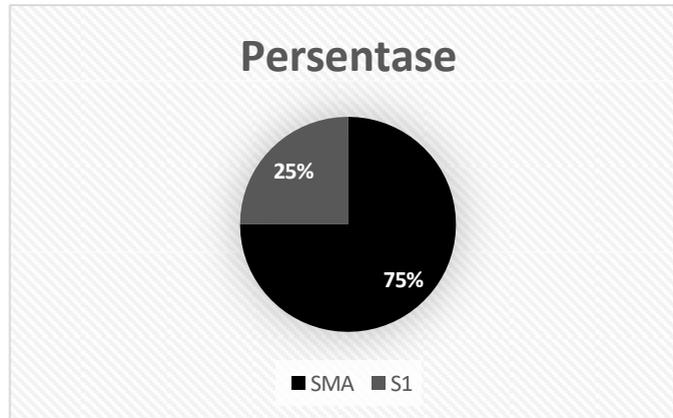
Gambar 4.2

c. Karakteristik Responden berdasarkan lama bekerja



Gambar 4.3

d. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir



Gambar 4.4

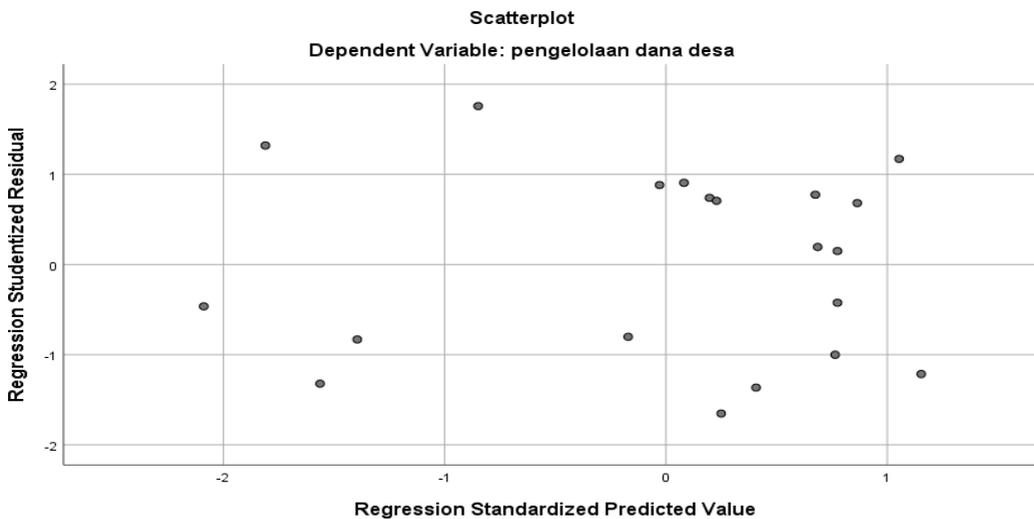
2.2.2.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		standardized Residual
N		20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46069164
Most Extreme Differences	Absolute	.151
	Positive	.103
	Negative	-.151
Test Statistic		.151
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai Asymp.sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas.



Gambar 4.1 Grafik Plot Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplots di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.11.
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.204	4.288		5.178	.000
	Akuntabilitas	.336	.078	.653	4.298	.000
	Transparansi	.159	.067	.361	2.376	.030

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

$$Y = 22,204 + 0,336 X_1 + 0,159X_2 + e$$

4.2.2. 4 Hasil Uji Hipotesis

1). Uji t

		Coefficients ^a			
Unstandardized Coefficients			Standardized		
Model	B	Std. Error	Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	22.204		5.178	.000
	Akuntabilitas	.336	.653	4.298	.000
	Transparansi	.159	.361	2.376	.030

a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji t Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa t hitung 4,298 > t tabel 2,086, sedangkan nilai sig. 0,000 < 0,05. Dari hasil perhitungan ini maka H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa. Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa t hitung 2,376 > t tabel 2,086, sedangkan nilai sig. 0,030 < 0,05. Dari hasil perhitungan ini maka H_a diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara parsial Transparansi terhadap Pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memberikan informasi bahwa akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dengan diarahkan kemampuan manajerial pengelolaan dana desa tepat sasaran dan kinerja yang baik pula. Hal ini dikarenakan juga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pembangunan di desa. Dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama dan mengawasi seluruh pembangunan di desanya, menggerakkan serta menilai berbagai pekerjaan yang sedang dilakukan. Tugas tersebut akan mudah untuk dilaksanakan jika para pemerintahan desa memiliki ketransparanan dana desa mengadakan pertemuan di balai desa ketika dana dari pemerintah baik dana desa maupun alokasi dana desa di cairkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, memiliki pengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa dengan t hitung 4,298 > t table 2;086 dan nilai sig 0,00 < 0,05. Dengan di terapkannya prinsip akuntabilitas tidak boleh ada sedikitpun fasilitas, anggaran, dan kewenangan yang dimiliki, digunakan bagi sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang di keluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya, transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa dengan nilai t hitung 2,376 > t table 2,086 dan nilai sig 0,030 < 0,05. Dengan diterapkannya prinsip transparansi maka akan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai dicapai. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat ikut mengawal pengelolaan keuangan guna mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang atau anggaran dan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana dapat diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M. A. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1-16
- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi Dan Herman Karamoy (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif*. Undang-Undang. (Nomor 23 Tahun (2014) tentang otonomi daerah.
- .
- .